

BAB III

KETERKAITAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DENGAN SYARI'AT ISLAM

A. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan telah dikenal dengan singkatan PPP, memiliki emberio dari kader-kader Masyumi termasuk NU, PSII dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Masyumi sebagai partai politik bersama partai politik lainnya dibubarkan presiden Soekarno dimasa pemerintahan Orde Lama melalui Dekrit Presiden tahun 1959¹. karena dianggap gagal menjalankan tugas di parlemen hasil pemilihan umum tahun 1955, yang tidak dapat melahirkan Undang-Undang yang dibutuhkan, atau kemungkinan karena kuatnya desakan Masyumi untuk mewujudkan nilai Islam secara formal, yang disuarakan dalam konstituante.

Pada pemerintahan Orde Baru, tahun 1971 pemilihan umum dilaksanakan dengan di ikuti oleh 10 (sepuluh) partai politik termasuk Golongan Karya bentukan rezim birokrasi dan ABRI, kader-kader Masyumi banyak bergabung di Parmusi yang ikut pemilu, hasil pemilu tersebut Golkar memperoleh kemenangan mutlak mencapai 62.80 %, kemenangan ini memudahkan pemerintahan Orde Baru berkuasa atas amanat Ketetapan MPRS No. XXII/1966, demi mendukung proses pemantapan stabilitas nasional, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, di bidang politik, adalah upaya untuk menyerderhanakan atau merampingkan Organisasi Sosial Politik yang sudah ada.

Maka pada tanggal 27 Pebruari 1970 Presiden Soeharto mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Partai Politik mengenai penyederhanaan Partai Politik dan pengelompokan dengan mendasarkan pada persamaan tekanan “aspek pembangunan”, sehingga terwujudlah 3 (tiga) kelompok yaitu : Kelompok

¹R.William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), h.

spirituil-materil yang merupakan cikal bakal Partai Persatuan Pembangunan, Kelompok materil-spirituil serta materiil-sprituil merupakan cikal bakal Golongan Karya serta Kelompok Materil-Spirituil yang merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), atas dasar maka dilakukan langkah-langkah oleh Penguasa dan Pimpinan Partai dengan lobi politik, secara khusus pada tanggal 13 Maret 1970 terbentuklah di DPR-RI hasil Pemilihan Umum yang baru dilaksanakan yaitu “Kelompok Persatuan Pembangunan” yang terdiri beberapa politik Islam dan mereka ini sepakat untuk menggabungkan partai mereka kedalam satu partai politik, mereka ini terdiri dari partai-partai politik Islam yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti) berfusi kedalam kelompok persatuan pembangunan yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya wadah pemersatu partai politik Umat Islam Indonesia yakni *Partai Persatuan Pembangunan* yang di deklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Qaedah 1392 Hijriah di Jakarta.

Presidium Badan Pekerja Pusat yang melibatkan para Pimpinan Fraksi yang mengadakan DPR-RI Kelompok Persatuan Pembangunan mengadakan rapat, hasilnya secara ikhlas dan tawakkal hanya kepada Allah SWT dan di tanda tangani oleh masing-masing Ketua Umum partai yang mengadakan fusi, di tambah 1 (satu) orang dari sesepuh Nahdhatul Ulama, secara lengkap bunyi Deklarasi Hasil Rapat Presidium Badan Pekerja Pusat dan Pimpinan Fraksi Kelompok Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut (disalin sesuai aslinya):

“Keempat Partai Islam : NU, PARMUSI, PSII dan PERTI yang sampai sekarang ini dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah setia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu Partai Politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita kita dalam pembangunan spirituil/materil

spirituil-materil yang merupakan cikal bakal Partai Persatuan Pembangunan, Kelompok materil-spirituil serta materiil-spirituil merupakan cikal bakal Golongan Karya serta Kelompok Materil-Spirituil yang merupakan cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), atas dasar maka dilakukan langkah-langkah oleh Penguasa dan Pimpinan Partai dengan lobi politik, secara khusus pada tanggal 13 Maret 1970 terbentuklah di DPR-RI hasil Pemilihan Umum yang baru dilaksanakan yaitu "Kelompok Persatuan Pembangunan" yang terdiri beberapa politik Islam dan mereka ini sepakat untuk menggabungkan partai mereka kedalam satu partai politik, mereka ini terdiri dari partai-partai politik Islam yaitu Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti) berfusi kedalam kelompok persatuan pembangunan yang kemudian dianggap sebagai satu-satunya wadah pemersatu partai politik Umat Islam Indonesia yakni *Partai Persatuan Pembangunan* yang di deklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Qaedah 1392 Hijriah di Jakarta.

Presidium Badan Pekerja Pusat yang melibatkan para Pimpinan Fraksi yang mengadakan DPR-RI Kelompok Persatuan Pembangunan mengadakan rapat, hasilnya secara ikhlas dan tawakkal hanya kepada Allah SWT dan di tanda tangani oleh masing-masing Ketua Umum partai yang mengadakan fusi, di tambah 1 (satu) orang dari sesepuh Nahdhatul Ulama, secara lengkap bunyi Deklarasi Hasil Rapat Presidium Badan Pekerja Pusat dan Pimpinan Fraksi Kelompok Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut (disalin sesuai aslinya):

"Keempat Partai Islam : NU, PARMUSI, PSII dan PERTI yang sampai sekarang ini dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah setia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu Partai Politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita kita dalam pembangunan spirituil/materil

Untuk merealisasi kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis

Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Pebruari 1973.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin".

Jakarta, 5 Januari 1973

PRESIDIUM KELOMPOK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Dr. K.H. Idham Chalid
H.M.S. Mintaredja, SH
Anwar Tjokroaminoto
Rusli Halil
K.H. Masykur²

Baru pada tanggal 13 Januari 1973, presidium Kelompok Partai Persatuan Pembangunan mengadakan rapat sesuai amanah Deklarasi untuk menyusun Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai wujud nyata dari fusi 4 (empat) partai Islam ini, walaupun terkesan dalam penyusunan ini tergesa-gesa, namun hasil dari musyawarah, diterima oleh semua pihak, maka personalia yang diposisikan memegang jabatan antara lain :

Presiden Partai Persatuan Pembangunan	Dr. KH. Idcham Chalid
Ketua Umum DPP	HMS. Mintaredja, SH
Sekretaris Jendral	Yahya Ubaid, SH
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat	K.H. Masjkur
Ketua Majelis Syura	KH.Bisri Sjamsuri ³

Tersusunnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP.PPP) yang pertama, kemudian tanggal 13 Pebruari 1973 bertempat di

²*Ketetapan-ketetapan Mukhtar* (Jakarta: DPP Jl. Diponegoro No 60) h. 121

³Sudarnoto Abdul Hakim, *The Partai Persatuan Pembangunan*, (Tesis, McGill University Montreal Canada, 1993. digandakan oleh Dirjen Bimarga Islam Dep. Agama RI 1996/1997) h.50

kediaman KH. Masjkur di Jalan Imam Bonjol 22 Jakarta berhasil disusun khittah perjuangan Partai atau lebih dikenal *Lima Rukun Khidmah* dan dalam pasal 2 Anggaran Dasar Partai tahun 1973 disebutkan bahwa PPP berasaskan *Islam*, bertujuan menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang di ridhai Allah SWT⁴. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mengharuskan semua kekuatan politik berasaskan Pancasila, maka PPP juga harus menyesuaikan diri dengan melalui Musyawarah Dewan Nasional PPP tanggal 6-8 Nopember 1975 di Jakarta, sehingga bunyi pasal 2 menjadi : “Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan Islam”⁵. Dan tahun 1977 Ketua Umum PPP HMS. Mintaredja menyerahkan Pimpinan kepada Jailani Naro,SH sebagai Ketua Umum PPP yang tanpa melalui Mukhtar atau kongres. Mukhtar I PPP baru dilaksanakan di Jakarta tanggal 20-22 Agustus 1984 dan menghasilkan beberapa Keputusan penting yang antara lain :

1. Perubahan kembali pasal 2 Anggaran Dasar PPP sehingga berbunyi : “Partai Persatuan Pembangunan Berazaskan Pancasila”
2. Perubahan Lambang dari Ka’bah kepada Tanda Bintang yang diambil dari Pancasila lambang Ketuhanan Yang Maha Esa⁶

⁴ AD/ART Partai Persatuan Pembangunan Tahun 1973.

⁵ *Ensiklopedia Islam, Jilid 4* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 85

⁶ Hal ini terjadi atas rekayasa pemerintahan rezim Orde Baru dimana pemerintahan di pimpin oleh Soeharto yang di dukung oleh Golongan Karya sebagai kekuatan Single Majority di DPR-RI dimana Presiden adalah Ketua Penasehat, serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga merupakan bagian dari Golkar sampai kepada seluruh Birokrasi diwajibkan Golkar, memenangkan Golkar, melindungi warga Golongan Karya walau terdapat kekeliruan di lapangan. Alasan Pemerintah bahwa seluruh Ormas dan Orpol telah berasaskan Pancasila dalam Negara Demokrasi Pancasila, maka lambing Partai Politik juga harus disesuaikan dengan Pancasila, maka PPP mengambil lambang Bintang dari Ketuhanan yang Maha Esa, Golongan Karya dengan pohon Beringin dari Persatuan Indonesia, serta Partai Demokrasi Indonesia dengan lambang Banteng dari sila keempat Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Bandingkan :Liddle, *Islam*, h. 80-82

kediaman KH. Masjkur di Jalan Imam Bonjol 22 Jakarta berhasil disusun khittah perjuangan Partai atau lebih dikenal *Lima Rukun Khidmah* dan dalam pasal 2 Anggaran Dasar Partai tahun 1973 disebutkan bahwa PPP berasaskan *Islam*, bertujuan menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang di ridhai Allah SWT⁴. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang mengharuskan semua kekuatan politik berasaskan Pancasila, maka PPP juga harus menyesuaikan diri dengan melalui Musyawarah Dewan Nasional PPP tanggal 6-8 Nopember 1975 di Jakarta, sehingga bunyi pasal 2 menjadi : “Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan Islam”⁵. Dan tahun 1977 Ketua Umum PPP HMS. Mintaredja menyerahkan Pimpinan kepada Jailani Naro,SH sebagai Ketua Umum PPP yang tanpa melalui Mukhtar atau kongres. Mukhtar I PPP baru dilaksanakan di Jakarta tanggal 20-22 Agustus 1984 dan menghasilkan beberapa Keputusan penting yang antara lain :

1. Perubahan kembali pasal 2 Anggaran Dasar PPP sehingga berbunyi : “Partai Persatuan Pembangunan Berasaskan Pancasila”
2. Perubahan Lambang dari Ka’bah kepada Tanda Bintang yang diambil dari Pancasila lambang Ketuhanan Yang Maha Esa⁶

⁴ AD/ART Partai Persatuan Pembangunan Tahun 1973.

⁵ *Ensiklopedia Islam, Jilid 4* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 85

⁶ Hal ini terjadi atas rekayasa pemerintahan rezim Orde Baru dimana pemerintahan di pimpin oleh Soeharto yang di dukung oleh Golongan Karya sebagai kekuatan Single Majority di DPR-RI dimana Presiden adalah Ketua Penasehat, serta Angkatan Bersenjata Republik Indonesia juga merupakan bagian dari Golkar sampai kepada seluruh Birokrasi diwajibkan Golkar, memenangkan Golkar, melindungi warga Golongan Karya walau terdapat kekeliruan di lapangan. Alasan Pemerintah bahwa seluruh Ormas dan Orpol telah berasaskan Pancasila dalam Negara Demokrasi Pancasila, maka lambing Partai Politik juga harus disesuaikan dengan Pancasila, maka PPP mengambil lambang Bintang dari Ketuhanan yang Maha Esa, Golongan Karya dengan pohon Beringin dari Persatuan Indonesia, serta Partai Demokrasi Indonesia dengan lambang Banteng dari sila keempat Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Bandingkan :Liddle, *Islam*, h. 80-82

Ketika penyusunan daftar Calon Anggota DPR-RI yang akan diajukan dalam Pemilihan Umum tahun 1982, dirasakan oleh Unsur Nahdlatul Ulama sangat riskan karena organisasi unsur Muslimin Indonesia (MI) dibawah komando Ketua Umum Jailani Naro,SH ditambah lagi hasil Muktamar I ini yang dianggap menyingkirkan kelompok pendukung fusi, yaitu Nahdlatul Ulama, maka terasa NU tidak lagi harmonis dalam barisan PPP, bahkan sebelum Muktamar NU, melalui Kongres di Situbondo tahun 1983 NU telah menyatakan untuk kembali ke “khittah 1926”, tidak lagi terlibat dalam politik praktis, hal ini merupakan sinyal bahwa NU telah keluar dari PPP, adapun orang NU yang terlibat dalam PPP, tentu bersifat pribadi dan bukan mewakili lembaga Ormas NU. Kejadian sedemikian ini terus berdampak pada perjalanan partai selanjutnya bahwa keributan internal selalu melanda PPP.

Keadaan partai politik terus mengalami kendala lain yang dilematis dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Parpol dan Golkar terjadi Floating Mass (Massa mengambang), kepengurusan partai politik hanya ada pada Ibu Kota/Kabupaten, untuk Kecamatan dan Desa hanya berbentuk Komosaris Kecamatan (Komcat) serta Komisaris Desa (Komdes) yang tidak dapat berperan apa-apa dalam wilayahnya. Sementara Golongan Karya mengharuskan seluruh Pejabat sejak dari Pusat sampai pada tingkat yang terkecil yakni Lingkungan atau Dusun harus anggota Golkar. Keadaan ini terus berlangsung selama kepemimpinan Orde Baru, Golkar terus semakin mantap dengan Single Majority-nya yang senantiasa didukung Birokrasi dan ABRI (TNI AD, TNI-AU, TNI-AL dan POLRI).

Dalam tulisan H.M. Dja'far Siddiq seorang kader PPP yang telah mengalami asam garamnya berpartai dalam bukunya berjudul *PPP Menggagas Reformasi, Membangun Indonesia Baru*, beliau mengungkapkan :

“ Jadi Golkar sebagai Kekuatan Sosial Politik memperoleh akses yang luas serta memperoleh Payung Politik (*political umbrella*) yang kukuh serta memperoleh perlakuan dan pelayanan yang khusus agar bias tampil sebagai “A strong Single Majority” untuk menopang ketangguhan Golkar ini kepadanya :

- a. Diberi ruang gerak bebas di lingkungan birokrasi dengan dilakukan apa yang dikenal dengan deparpolisasi birokrasi melalui lahirnya Permen (Peraturan Pemerintah) No. 12 (dukungan birokrasi).
- b. Dukungan kental ABRI di awal Orde Baru
- c. Berbagai kemudahan rekrutmen para fungsionaris.
- d. Dukungan pasilitas dan dana yang amat besar, baik yang bersumber dari birokrasi maupun yang berasal dari perusahaan negara dan swasta”⁷

Sementara nasib partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, selalu dilanda kericuhan internal yang diciptakan, mendapat tekanan dan intimidasi dari aparat Pemerintahan dan ABRI sampai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

Tidak banyak berubah keadaan PPP sejak Mukhtar I tahun 1984 yang dipimpin Jailani Naro, SH dengan Sekjennya Mardinsyah, Mukhtar II tahun 1989 dipimpin Ketua Umumnya H. Ismail Hasan Metareum, SH dengan Sekretaris Jendralnya Matori Abdul Djalil, Mukhtar III tahun 1994 memilih Ketua Umum H. Ismail Hasan Metareum, SH dan posisi Sekjen dipangku oleh kader dari NU yakni Drs. H. Tosari Widjaya, Mukhtar ke IV tahun 1998 (setelah reformasi) memilih Ketua Umumnya dan ternyata berbeda dengan tradisi sebelumnya dari MI, dalam Mukhtar ini terpilih H. Hamzah Haz, B.Sc kader dari NU dan Sekretarisnya Ali Marwan Hanan, SH, dan terakhir Mukhtar ke V yang diadakan di Jakarta tanggal 20-24 Mei 2003 dengan segala tarik tingkat tinggi di tubuh Partai sehingga H. Hamzah Haz tampil sebagai Ketua Umum, posisi tambahan adanya Wakil Ketua Umum yang dipegang oleh H. Ali Marwan Hanan, SH serta posisi Sekjen di percayakan kepada pendatang baru dari Purnawirawan TNI Yunus Yosfiah (pernah menjabat Menteri Penerangan pada masa Pemerintahan Burhanuddin Jusuf Habibie) setelah dalam formaturnya menyingkirkan sesepuh Parmusi yakni M. Husni Thamrin dan Bachtiar Chamsah.

Dalam kepemimpinan partai dari mukhtar ke mukhtar yang di kaitkan dengan perjalanan Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Daerah Istimewa

⁷M. Dja'far Siddiq, *PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru*, (t.t: ttp, 2003) h.6

Aceh tentu sangat erat, sebab salah satu pengurus teras bahkan pernah menjadi ketua umum adalah putra dari Nanggroe Aceh Darussalam yakni H. Ismail Hasan Metareum, SH dengan panggilan akrabnya Buya. Mungkin karena faktor ini juga maka PPP tetap eksis di Aceh, sebab orang Aceh merasa beban mental, jika di kampung ketua DPP nya sendiri PPP harus kalah. Sisi lain hubungan emosional orang Aceh dengan Islam tidak terpisahkan, didukung pula oleh propaganda konflik keharmonisan pemerintahan pusat dengan rakyat Aceh menjadi masalah tersendiri, hal ini memberi peluang bagi PPP memperoleh dukungan dari rakyat.

Sedangkan sejarah Partai Persatuan Pembangunan, sejak adanya pengelompokan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahwa 2 (dua) hari sebelum pendeklarasian Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta yakni tanggal 3 Januari 1973⁸, kelompok Persatuan Pembangunan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh hasil Pemilihan Umum tahun 1971 yang mewakili Partai Partai Islam dengan perolehan suara masing-masing:

Tabel : I (Pemilihan Umum Tahun 1971 Yang Mewakili Partai-Partai Islam)

NO	PARTAI	PERSEN	KURSI
1.	Partai Muslimin Indonesia	116.560 suara	6 kursi
2.	Partai Islam Perti	124.151 suara	4 kursi
3.	Nahdlatul Ulama	88.018 suara	3 kursi
4.	PSII	73.269 suara	3 kursi

Telah bergabung dan di sambut baik oleh pimpinan masing-masing Partai di atas, yang dibuktikan pembuatan naskah dan penanda tangan "Piagam Penyatuan Politik Partai-Partai Islam" Tingkat satu Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh pada tanggal 3 Januari 1973 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Qaedah 1392 Hijriyah yang berbunyi:

⁸Ahmad Zaini Ibrahim, Sekretaris Pekerja Kelompok/Wakil Ketua MPW. DPW.PPP Prov. NAD, wawancara di Keutapang Banda Aceh, tanggal 26 September 2006.

“Bahwa kesadaran tuntutan hati nurani umat Indonesia untuk mewujudkan prinsip Ummatan Wahdah dan ukhuwah Islamiah dalam segala bidang kehidupan, telah melahirkan berbagai usaha dan kegiatan pada setiap pimpinan Partai-partai Islam di seluruh Indonesia melalui musawarah mupakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

Bahkan ketetapan MPRS No. XXIII/1966 merupakan langkah pasti untuk menciptakan stabilitas Nasional dan pembinaan struktur yang serasi yang akan menunjang suksesnya pembangunan Republik Indonesia, lahir dan batin menuju masyarakat adil dan makmur dibawah ampunan Ilahi.

Bahwa hasil konsultasi dengan pemimpin pusat konfederasi dan pemimpin wilayah partai. Dirasakan telah tiba saatnya untuk melahirkan suatu “Piagam Penyatuan kegiatan Politik” partai-partai Islam tingkat Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai suatu peningkatan yang rill dari kompederasi Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan mensyukuri limpahan rahmat karunia limpahan Allah Swt, sambil mengharapkan hidayah-Nya dengan bimbingan ajaran Muhammad Saw. Serta dengan semangat dan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami :

- a. Pimpinan Konfederasi Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pimpinan Wilayah Partai-partai Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh

MENYATAKAN :

1. Meningkatkan “Kelompok Islam Persatuan Pembangunan” Provinsi Daerah Istimewa Aceh baik bentuk maupun isi sebagai wadah politik satu-satunya bagi organisasi-organisasi Islam yang berorientasikan kepada program pembangunan negara dan bangsa Indonesia dengan tujuan mengamalkan dan mempertahankan PANCasila sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia.
2. Dengan mendahului ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme pedoman dasar dan program organisasi untuk pertama kali Pimpinan Wilayah kelompok Islam Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai terlampir
3. Segala sesuatu akan di ubah, dan ditambah atau disesuaikan kembali jika telah ada ketentuan-ketentuan lain dikemudian hari yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam program ini⁹.

Para Pimpinan Wilayah Partai partai-partai Islam dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh ketika itu yang menanda tangani piagam penyatuan Partai ini adalah :

1. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) :

Ketua : Drs. M. Kaoy Syah

⁹Disalin dari : Dokumentasi Arsip DPW. PPP Prov. NAD pada tanggal 27 September 2006 (posisinya kebetulan pada almari ruang Ketua PHW. Di lantai II Sekretariat DPW. PPP Prov di Jalan Syiah Kuala Nomor 233 Banda Aceh sehingga selamat dari Tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Terbukti bahwa banyak dokumen Partai yang hanyut serta tidak dapat dipergunakan lagi karena terendam air dan hilang, namun kantor selamat dan masih berdiri kokoh hingga saat ini

- Sekretaris : Drs. Bachtiar Effendy
2. Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PI.Perti) :
- Ketua : K. Ishaq Sulaiman
- Sekretaris : T.A. Rachman Hasan, BA
3. Partai Nahdhatul Ulama (NU) :
- Ketua : T. Bachtiar Panglima Polem, SH
- Sekretaris : Baharuddin Mahmud, BA
4. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) :
- Ketua : Drs. Yusuf Z.A
- Sekretaris : Ahmad Zaini Ibrahim

Mereka ini juga menyusun Kelompok Islam Persatuan Pembangunan Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka mengingat di tingkat Pusat telah terbentuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tentu sudah saatnya mereka ini bermusyawarah untuk menyusun dan menunjuk personalia Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh untuk pertama kalinya, dan menunjuk Rapat Ketua Schaap dipercayakan kepada beberapa orang untuk menyusun DPW/MPW. PPP yakni :

1. Tgk. Ghazali Amna (Parmusi)
2. K. Ishaq Sulaiman (PI. Perti)
3. A. Wahab Ibrahim (PSII)
4. M. Yahya Luthan (Nahdhatul Ulama)
5. Mudji Budiman (Parmusi)
6. Achmad Zaini Ibrahim (PSII/Sekr. Kerja Kelompok)

Dengan mengambil tempat di kediaman A.Wahab Ibrahim (Pimpinan Wilayah PSII Tingkat I Daerah Istimewa Aceh dan Mantan Komandan Desimen DI/TII) di desa Buga Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 1973 yang di mulai pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.00 WIB berhasil menyusun Dewan Pimpinan Wilayah dan Majelis Pertimbangan

Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Aceh priode pertama yang di pimpin oleh Tgk. Ghazali Amna. Drs. M. Kaoy Syah waktu itu tidak masuk kedalam deretan Pengurus Harian DPW dan MPW karena beliau dari unsur Parmusi (MI), sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan kesepakatan¹⁰. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah serta Piagam Penyatuan Partai Politik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mendapat Pengesahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan Keputusan Nomor : 026/DPP/PP/Kep/1973 tanggal 14 Juni 1973 bertepatan tanggal 13 Jumadil Awal 1393 yang di tanda tangani oleh Ketua Umum HMS. Mintaredja, SH ; Sektretaris Jendral Jahya Ubied,SH ; Presiden Partai K.H. DR. Idham Chalid serta Ketua majlis Pertimbangan Partai K.H. Masjkur.

Dalam hal penjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Tgk. Ghazali Amna (1973 –1983), Drs.H.M. Kaoy Syah, M.Ed (1983-1993), Drs. H.AR.Rasyidi (1993-1998), Drs. Tgk. Muhammad Yus (1998 –2003) dan Tgk. H. Zainal Abidin (2003 – sekarang, menurut rencana pada tanggal 20-21 Nopember 2006 yang akan datang dilaksanakan Musyawarah Wilayah PPP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, agenda utama dalam Musywil adalah pemilihan dan penetapan kembali personalia Pimpinan Harian Wilayah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, Pimpinan Majelis pakar Wilayah, di samping membuat program kerja partai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pemilihan Umum di Nanggroe Aceh Darussalam untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Aceh, PPP senantiasa bertahan, bahkan bersaing ketat dengan Golkar sejak awal pemilu pertama setelah fusi tahun 1977, sampai dengan pemilu terakhir di era Reformasi tahun 2004, menurut catatan T.Hasyim

¹⁰Ahmad Zaini Ibrahim, Sekretaris Pekerja Kelompok/Wakil Ketua MPW. DPW.PPP Prov. NAD, wawancara di Keutapang Banda Aceh, tanggal 26 September 2006.

Thayeb dalam karyanya “ *Sejarah Singkat Fusi 4 Partai Islam*”, khusus untuk PPP personalia yang duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah sebagai berikut :

PEMILIHAN UMUM 1977

1. Drs. M. Kaoy Syah	MI
2. Tgk. Ghazali Amna	MI
3. Drs. Sa'aduddin Djamal	MI
4. Tgk. M. Nurdin Amin	MI
5. Drs. Sulaiman Daudi	MI
6. Miswar Sulaiman	MI
7. Marzuki Abubakar	MI
8. K. Ishak Sulaiman	PERTI
9. M. Saman Yusuf	PERTI
10. Tgk. Djamaluddin Waly	PERTI
11. Tgk. Abubakar Sabil	PERTI
12. A. Wahab Ibrahim	SI
13. Drs. M. Daud Mansur	SI
14. Tgk. Ismail Ben	SI
15. Puteh Mauni	SI
16. M. Yahya Luthan	NU
17. M. Daud Hasan	NU
18. Tgk. Syama'un Putra	NU

PEMILIHAN UMUM 1982

1. H. Ghazali Amna	MI
2. Drs. Sa'aduddin Djamal	MI
3. H. Ibrahim Lho'Sukon	MI
4. Miswar Sulaiman	MI
5. Muhammad Yus	MI
6. Drs. Sulaiman Daud	MI
7. Ny Umamah Abdullah Lam-u	MI
8. K Ishak Sulaiman	PERTI
9. Drs. Djamaluddin Waly	PERTI
10. M. Amin Hasyim	PERTI
11. Tgk.H. Abubakar Sabil	PERTI
12. T. Husin	NU
13. Ilyas Wahab	NU
14. H. M. Yahya Luthan	NU
15. Tgk. H Lidan Hasyim	NU

16. Tgk Awahab Ibrahim	SI
17. M. Nur Nain	SI
18. Usmanuddin	SI
19. M. Sahim Hasyim	SI

PEMILIHAN UMUM 1987

1. Drs. H. Sa'aduddin Djamal	MI
2. Drs. A. R Rasyidi	MI
3. H. Ibrahim Lho'Sukon	MI
4. Miswar Sulaiman	MI
5. Muhammad Yus	MI
6. Muslim MS, BA	MI
7. Drs. Rahman Haroen	PERTI
8. Syahminan	PERTI
9. Tgk. M. Daud Zamzamy	PERTI
10. A. Hakim Harahap	PERTI
11. Hj. Riwayah Banta, BA	NU
12. Z. Abidin Matsyam	NU
13. H.M Yahya Luthan	NU
14. Drs. M.Daud Mansur	SI
15. Usmanuddin	SI

PEMILIHAN UMUM 1992

1. Drs. HM. Kaoy Syah Med	MI
2. Drs. A. R. Rasyidi	MI
3. Drs. Ilyas Abdullah	MI
4. Drs. Sulaiman Daudi	MI
5. Drs. Zulkifli Amin	MI
6. Drs. Razali Sabil	PERTI
7. Tgk.M. Daud Zamzamy	PERTI
8. Dhiauddin Ishak/Syahminan	PERTI
9. Nurdahri Ibrahim Nain	NU
10. Said Jamaluddin	NU
11. Drs. HM Daud Mansur	SI
12. Achmad Zaini Ibrahim	SI

PEMILIHAN UMUM 1997

1. Drs. H. AR. Rasyidi	MI
2. Drs. Zulkifli Amin	MI
3. Drs. Ilyas Abdullah	MI
4. Drs. Sulaiman Daudi	MI

5. Hj. Hamriah Z Bakry	MI
6. Drs. Rusli Ibrahim	PERTI
7. A. Hakim Harahap	PERTI
8. Tgk. Rasyidin Abdullah	PERTI
9. Ibnoe Arhas	NU
10. Drs. Mustafa A Gelanggang	NU
11. Drs. M.Munir Azis	SI
12. Murhaban Makam	SI

PEMILIHAN UMUM 1999

1. Drs. Tgk Muhammad Yus	MI
2. Zaini Sulaiman, SH	MI
3. Tgk Zainal Abidin	MI
4. Muchlis Muchtar, SH	MI
5. Mohd Faisal Amin	MI
6. Ir Saidi Hasan Porang	MI
7. Abdullah Saleh. SH	PERTI
8. Hasbi Bustamam. SE. AK	PERTI
9. Said Muchsin	PERTI
10. Muzakki Salha	SI
11. Murhaban Makam	SI
12. Drs. M. Munir Aziz	SI
13. Drs Mustafa A Gelanggang	NU
14. Rukaiyah Ibrahim Naim	NU ¹¹

PEMILIHAN UMUM 2004

(Pemilihan yang tidak kental dengan unsur dalam PPP dan setengah distrik)

1. Tgk. H. Muhammad Paisal Amin
2. Drs. M. Gade Salam
3. Drs. Bahrom Mohd. Rasyid
4. Abdullah Shaleh, SH
5. Tgk. H. Zainal Abidin
6. Basrun Yusuf, SH
7. Tgk. H. Rasyidin Abdullah
8. Burhanuddin, SH
9. H. Marhaban Makam

¹¹T.Hasyim Thayeb, *Sejarah Singkat Fusi 4 Partai Islam*, (t.t: t.tp, t.th), h.19-23

10. Hj. Zainab AR,BA

11. Ir. Saidi Hasan Porang

12. H. Muzakki salha

B. Kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggara Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan Bab VII pasal 12 – 29 menyatakan bahwa struktur pengurus terdiri dari:

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan yang berkedudukan di Ibukota Negara, maka susunannya terdiri atas:
 - Pimpinan Harian Pusat (dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar)
 - Pimpinan Majelis Syari'ah (dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar)
 - Pimpinan Majelis Pertimbangan Pusat (dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar)
 - Pimpinan Majelis Pakar Pusat (dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar)
 - Anggota Majlis Syari'ah (dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Harian Pusat)
 - Anggota Majlis Pertimbangan Pusat (dipilih dan ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan arian Pusat)
 - Anggota Majlis Pakar Pusat (dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Pusat)
 - Departemen (dibentuk sersuai Kebutuhan yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Pusat
 - Lembaga (dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Pusat
 - Badan Otonom (dapat dibentuk oleh DPP sesuai kebutuhan dan personalianya dipilih oleh badan otonom bersangkutan yang ditetapkan oleh Pimpinan Harian Pusat untuk yang kepengurusan yang pertama, selanjutnya akan di atur oleh Peraturan Rumah Tangga (PRT) Badan Otonom bersangkutan dan dengan Partai bersifat konsultasi)

2. Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di Ibukota Provinsi yang susunan kepengurusan terdiri atas :

- Pimpinan Harian Wilayah (dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Pusat)
- Pimpinan Majelis Pertimbangan Wilayah (dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Pusat)
- Pimpinan Majelis Pakar Wilayah (dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Pusat)
- Anggota Majelis Pertimbangan Wilayah (dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Wilayah)
- Anggota Majelis Pakar Wilayah (dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Wilayah)
- Biro (dibentuk oleh Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Wilayah bersangkutan)
- Lembaga (dibentuk oleh Pimpinan Wilayah sesuai dengan kebutuhan yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Wilayah bersangkutan)
- Badan Otonom (dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Wilayah sesuai kebutuhan dan untuk pertama sekali kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Wilayah dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Rumah Tangga (PRT) Badan Otonom bersangkutan, jika ada kesesuaian nama dengan yang di pusat, maka secara otomatis dapat mengacu untuk setiap tingkatan kepengurusan

3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang terdiri atas :

- Pimpinan Harian Cabang (Dipilih oleh Musyawarah Cabang bersangkutan dan disahkan oleh Pimpinan Harian Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Harian Wilayah)
 - Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang (Dipilih oleh Musyawarah Cabang bersangkutan dan disahkan oleh Pimpinan Harian Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Harian Wilayah)
 - Pimpinan Majelis Pakar Cabang (Dipilih oleh Musyawarah Cabang bersangkutan dan disahkan oleh Pimpinan Harian Pusat setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Harian Wilayah)
 - Anggota Majelis Pertimbangan Cabang (dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang bersangkutan)
 - Anggota Majelis Pertimbangan Cabang (dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang bersangkutan)
 - Bahagian-Bahagian (dapat dibentuk oleh Pimpinan Harian Cabang yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang bersangkutan)
 - Lembaga-Lembaga (dapat dibentuk oleh Pimpinan Harian Cabang yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang bersangkutan)
 - Badan Otonom (dapat dibentuk oleh Pimpinan Harian Cabang yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang bersangkutan)
4. Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di Ibukota Kecamatan yang terdiri atas :
- Pimpinan Harian Anak Cabang (dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang bersangkutan dan disahkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang)
 - Pimpinan Majelis Pertimbangan Anak Cabang (dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang bersangkutan dan disahkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Cabang)

- Anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang (dapat dibentuk oleh Pimpinan Harian Anak Cabang yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Anak Cabang bersangkutan)
 - Seksi-seksi (dapat dibentuk oleh Pimpinan Harian Anak Cabang sesuai kebutuhan yang personalianya dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Anak Cabang)
5. Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan di Kelurahan/Desa/Kampung yang terdiri atas :
- Pimpinan Harian Ranting (dipilih oleh Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pimpinan Harian Cabang setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Harian Anak Cabang)
 - Pimpinan Majelis Pertimbangan Ranting (dipilih oleh Musyawarah Ranting dan disahkan oleh Pimpinan Harian Cabang setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Harian Anak Cabang)
 - Anggota Majelis Pertimbangan Ranting (dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Harian Ranting yang bersangkutan)
 - Kelompok Kerja Ranting (dapat dibentuk oleh Pimpinan Harian Ranting sesuai kebutuhan di Pimpinan Ranting bersangkutan yang personalianya dipilih dan dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Harian Ranting bersangkutan.

Dalam hal kelembagaan yang berkaitan dengan Partai Persatuan Pembangunan, ada dikenal dengan organisasi Orde Bow (organisasi pendukung dibawah binaan Partai Persatuan Pembangunan atau organisasi yang lahir dari internal Partai), maka di antara Organisasi tersebut ada beberapa hal dikenal serta ada hanya bersifat insidental yang bersifat sesaat, diantaranya adalah :

1. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) yang boleh dibentuk di semua tingkatan kepengurusan Partai yang terdiri unsur wanita anggota dan simpatisan Partai, sebagai otonom dalam Partai dan saat ini di tingkat

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di pimpin oleh Hj. Eliza Sa'aduddin Jamal dan memiliki peranan garda depan Partai untuk merebut suara partai khususnya dari unsur perempuan.

2. Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), yang walaupun bersifat independent, tetapi sejarah dan keberadaannya tidak terpisahkan dari Kelembagaan Partai Persatuan Pembangunan.
3. Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) yang lahir dari tubuh Partai Persatuan Pembangunan, yang saat ini telah mempunyai kepengurusan sejak dari Pusat sampai ke Daerah-Daerah di seluruh Indonesia.
4. Angkatan Muda Ka'bah yang merupakan korp Baret dan Satuan Tugas (satgas) serta panser bagi Partai Persatuan Pembangunan dalam setiap acara Partai. keberadaannya hampir terpenuhi untuk tingkatan Pimpinan yaitu Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
5. Gerakan Pemuda Islam juga sangat dekat dan akrab dengan PPP, sebagai organisasi Pemuda senantiasa di bina dan dibantu oleh Partai, sehingga hubunganh emosional tetap setia dan taat kepada Partai.

Kemudian untuk setiap tingkatan dapat membentuk Lembaga/Badan atau berupa kelompok kerja yang dianggap perlu, dibutuhkan serta disesuaikan dengan kemampuan pada tingkatan kepengurusan, hal ini termasuk badan usaha Partai seperti Koperasi atau jenis usaha lainnya dalam rangka mengoptimalkan kader-kader Partai baik di Pusat ataupun di Daerah-Daerah. Sehingga harapan dari kerjasama dan keharmonisan dikalangan intern partai akan menjadi modal dalam menghadapi kegiatan-kegiatan Partai terlebih ketika menjelang dan menghadapi Musyawarah, temu kader dan pesta akbar yaitu Pemilihan Umum.

C. Tujuan Khittah Perjuangan Serta Strategi PPP

Jika kita lihat dari proses lahirnya Partai Persatuan Pembangunan di negeri ini, jelaslah jati dirinya sebagai partai Islam, ciri dari disebutkannya partai Islam

antara lain asas Islam, lambang partai dengan Ka'bah sebagai lambang kiblat umat Islam, seluruh pengurus sejak pusat sampai Daerah beragama Islam, perjuangan yang dilakukan lebih bernuansa Islam, PPP adalah satu-satunya wadah Partai bagi umat Islam Indonesia di era Orde Baru. Hanya saja ketika tuntutan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 yang mengharuskan semua Partai harus berasaskan Pancasila, maka PPP menyesuaikan diri dengan Undang-Undang, lambing juga disesuaikan dengan mengambil gambar Bintang dari bingkai Pancasila, dalam perjalanannya jelas sangat berkepentingan. Upaya penerimaan asas Pancasila harus diterjemahkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilihat dari kacamata Agama Islam, berdasarkan perjuangan dengan emosional keagamaan.

Setelah era Reformasi, PPP tanpa ragu melalui Muktamar ke IV tahun 1998 mencantumkan kembali di Bab II Asas dan Tujuan, dimana pasal 2 berbunyi “ *Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam*” selanjutnya dalam Pasal 3 berbunyi : “Tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah Ridha Allah Subhanahu wata’ala”. Oleh karena itu dalam Pasal 4 Bab III Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yang merumuskan tentang Usaha yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan, Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut *Syari'at Islam*.
 - c. Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.
 - d. Menegakkan, membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. Memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari Negara Hukum yang merdeka, berdaulat, demokratis, dan menghormati Hak Asasi Manusia.
 - f. Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani.
 - g. Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai.
 - h. Memberantas paham komunisme/atheisme dan paham-paham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila.
 - i. Turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar hormat menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab.
 - j. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai.
2. Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dan kontitusional¹².

Partai Persatuan Pembangunan adalah partai warisan Ulama, partai umat dan salah satu organisasi yang memiliki kader, hal ini cukup beralasan karena PPP lahir dari Organisasi Islam, perpolitikan disalurkan melalui PPP sedangkan organisasi dari unsur-unsur PPP tersebut tidak melepaskan diri dari organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Partai Muslimin Indonesia yang menaungi beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah, Al Jam'iyatul Washliyah ; Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam bidang sosial, dakwah dan pendidikan. Setelah mengadakan fusi dan lahirlah Partai Persatuan Pembangunan sebagai wadah politik Islam satu-satunya dimasa Orde Baru.

Ketika fusi telah di tanda tangani oleh Presidium Kelompok Persatuan Pembangunan, maka pada tanggal 13 Pebruari 1973, Presidium mengadakan rapat di kediaman KH.Masjkur, di Jalan Imam Bonjol 20 Jakarta, untuk

¹² Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP dari hasil Ketetapan Mukhtar V Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 3A/TAP/Mukhtar V/PPP/V/2003 tentang Perubahan dan Tambahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tanggal 22 Mei 2003

menyusun khittah (cita-cita, rencana) perjuangan Partai yang dikenal dengan *Lima Rukun Khidmat Partai* yang berisi :

1. Berkhidmat untuk mewujudkan dan membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan meningkatkan mutu (kwalitas) kehidupan beragama serta mengembangkan kehidupan Agama Islam dalam masyarakat melalui Pendidikan, dakwah dan berbagai upaya lainnya ,
2. Berkhidmat untuk mengamalkan dan mempertahankan Pancasila serta melaksanakan Undang-Undang dasar 1945 secara murni dan konsekwen guna tercapainya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 menuju masyarakat adil dan makmur rohaniyah jasmaniah yang di ridhai Allah SWT ,
3. berkhidmat untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan dann persatuan umat Islam Indonesia guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,
4. Berkhidmat untuk melaksanakan pembangunan Nasional dan pembangunan demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi dibidang-bidang lainnya dalam rangka mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan, kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,
5. Berkhidmat untuk mencegah pola kehidupan yang bersifat materialistis serta memberantas paham marxisme dan komunisme, leninisme, dan liberalisme dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia¹³

Namun setelah era Reformasi, banyak perubahan yang terjadi dalam peta perpolitikan di Indonesia, sebagai indikasi kemenangan perjuangan rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa, dosen serta komponen masyarakat lainnya, berjuang bersama, menyampaikan orasi secara bergantian, memaparkan seluruh kelemahan pemerintahan Orde Baru, mendesak agar Soeharto mundur, akhirnya dapat meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Baru, yang telah berkuasa selama lebih 30 tahun, kekuasaan yang sulit ditembus karena kekuatan benteng yang dilindungi oleh Angkatan Bersenjata, birokrasi sejak pusat hingga ketingkat paling bawah Desa dan Dusun, kemunduran Soeharto sebagai Presiden adalah kemenangan untuk rakyat, maka kemenangan itu ditindak lanjuti dengan kebebasan berpolitik secara praktis, seperti di bolehkannya rakyat membentuk Partai Politik baru,

¹³. Disalin dari naskah asli di DPP. PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta; lihat juga: *Ensiklopedia Islam jilid 4*, h. 85

sehingga bermunculanlah Partai Politik baru, yang dengan latar belakang yang sama dan berbeda, dengan tokoh sentral yang populer dan tidak populer, bahkan dari internal PPP, ada kader yang berusaha membuat Partai baru seperti PSII 1926, Partai Persatuan dan sebagainya, mengatas namakan Partai yang berazas Islam sama dengan PPP seperti Partai Keadilan yang hari ini kita kenal dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Umat Islam (PUI), Partai Bintang Reformasi (PBR). Ada partai berbasis nasionalis, bahkan ada bersifat etnis seperti Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dan seterusnya.

Mungkin membaca penomena ini, kader dan fungsionaris PPP di tingkat pusat, sesuai jati dirinya sebagai partai Islam, membuka wacana dan pengembangan wawasan dengan lebih membuka diri, dengan penyesuaian bentuk dan redaksi dengan era kekinian, hal ini terbukti sebagai contoh. jika dilihat dalam Ketetapan Muktamar V Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 4/TAP/Muktamar V/PPP/V/2003 Tanggal 23 Mei 2003 tentang Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan, pada lima khidmat PPP mengalami perubahan, hal ini mungkin atas pertimbangan lebih sistematis, lebih mudah dipahami, jika dibandingkan dengan lima khidmat di atas, saat ini lengkapnya tertulisnya adalah:

Tabel : II (Program PPP Dalam 5 Khidmat)

NO	AMAR MA'RUF (MENYERU KEBAIKAN)	NAHI MUNKAR (CEGAH YANG MUNKAR)
1.	PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mensyi'arkan kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim)	PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/ marxisme/leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia
2.	PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai ajaran	PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses

	Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia)	dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan
3.	PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaran sebangsa)	PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik social yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal ika
4.	PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat	PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat
5.	PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur	PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan social, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan

Untuk menjalankan khidmat PPP diatas, maka dalam memperjuangkan cita-cita politik, maka setiap kader diharuskan memegang perinsip-perinsip dasar perjuangan yang telah digariskan dalam PPP yakni :

1. Prinsip Ibadah.

PPP dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip Ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya :

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (الذاريات: ٥٦)

Artinya : dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku (Q.S.Al-Dzaariyaat : 56)

Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran partai merupakan keterpanggilan untuk beribadah, keterpanggilan karena Allah, wajarlah didoktrin kepada setiap kader Partai, bahwa “menjadi anggota Dewan bukanlah tujuan, akan tetapi menjadi anggota dewan suatu keharusan semata sebagai alat untuk mencapai tujuan”¹⁴

2. Prinsip Istiqamah

PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai dasar perjuangan Partai, maka keberhasilan perjuangan Partai akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah itu akan terus ditegakkan dan dimantapkan dalam perjuangan Partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita Nasional. Istiqamah disini dimaksudkan adalah perjuangan yang lurus semata untuk mencapai ridha Ilahi, bukan karena penyebab lain prinsip itu di tegakkan, oleh karena itu mereka terus tetap berjuang tanpa kekhawatiran serta dilaksanakan dengan penuh rasa sukarela dan ikhlas, terhadap inilah kesan yang disampaikan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yakni :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (الاحقاف : ١٣)

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “ Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka istiqamah (berketetapan hati), maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak pula berduka cita (Q.S.Al-Ahqaf :13)*

3. Prinsip Kebenaran, kejujuran, dan Keadilan

Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan

¹⁴Iedil Suryadi, Wakil Bendahara DPP. PPP, wawancara di Jakarta, tanggal 14 September 2006

kebatilan. Meskipun begitu, kebenaran yang menjadi prinsip perjuangan partai bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu Wata'ala yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun.

Prinsip kejujuran atau amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apapun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketentraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat.

PPP akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketentraman, dan sekaligus akan menghilangkan kezaliman, kesenjangan, keresahan dan konflik.

4. Prinsip Musyawarah

PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu terus ditumbuh kembangkan. Dikaitkan dengan ajaran Islam, tentunya prinsip Musyawarah ini didasarkan kepada ayat Al qur'an yang berbunyi :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من
 حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاؤهم في الأمر فاذا عزمتم فتوكل
 على الله إن الله يحب المتوكلين (ال عمران : ١٥٩)

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu ma'afkanlah mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuat tekad, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali 'Imran : 159)

Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggung jawabkan secara moral kepada Allah SWT. apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai mupakat, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas.

5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan dan Persatuan.

Partai Persatuan Pembangunan secara jelas mendasarkan perjuangannya atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah, perbedaan itu dimata Allah hanyalah ketaqwaannya, yang didasarkan kepada Firman Allah SWT :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروانثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير (الحجرات : ١٣)

Artinya :Wahai sekaian manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti (Q.S. Al Hujurat : 13)

Ini adalah keyakinan yang mendasar, dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai, sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara. Prinsip kebersamaan, PPP berjuang untuk mengembangkan nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan secara profesional, sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan apalagi bentuk pemberontakan atau makar.

PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan, dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi, dan berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan Partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita Nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan secara partisipatoris. Karena itu, prinsip ini perlu dipelihara terus menerus bagi kalangan warga dan simpatisan Partai serta berupaya mewujudkannya dalam sikap dan tindakan nyata dalam internal partai untuk memikul beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah, harmonis, demokratis sebagai cita-cita kolektif bersama bangsa Indonesia.

6. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong serta memotivasi semua pihak untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik dan benar, selanjutnya mencegah semua pihak dari segala perbuatan yang tercela lagi munkar. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan

atau kontrol sosial. Ketegasan prinsip ini secara jelas tercantum dalam Muqaddimah Anggaran Dasar PPP yang dikutip dari Ayat Al Qur'an, yakni :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله ولوأمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم
الفاسقون (ال عمران : ١١٠)

Artinya : *Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S.Ali 'Imran : 110)*

Dengan prinsip ini Partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi apa yang disebut *political decay* (pembusukan politik) yang di akibatkan oleh sikap membiarkan kemunkaran yang lebih jauh dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan (universal). Prinsip ini juga akan dapat menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran sebagaimana Sabda Nabi Besar Muhammad SAW :

قل الحق ولو كان مرا (الحديث رواه الترمذي)

Artinya : *"Katakan kebenaran itu walaupun hal itu pahit (sulit)*
(H.R. At-Tirmudzi)

Hal-hal di atas merupakan gambaran dari tujuan, garis perjuangan partai, untuk itu strategi yang di lakukan harus tetap menjiwai nilai-nilai ke Islaman sebagai acuan, memotivasi umat dalam bingkai *ummatan wahidan* menuju *rahmatan lil'alamiin, baldatun thayyibatun warabbun ghafur*.

D. Konsep PPP tentang Syari'at Islam

Secara tegas melalui dokumen resmi yang ditelusuri oleh penulis baik di Dewan Pimpinan Pusat PPP di Jakarta, di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pembicaraan dengan personalia secara pribadi yang terlibat langsung dalam proses perjuangan Pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak ada dijumpai konsep PPP secara khusus. Namun secara tersirat dapat dimaklumi hampir semua kader PPP menghendaki pemberlakuan Syari'at Islam, indikasi ini dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen :

1. PPP sebagai partai hasil fusi Partai Islam, berasaskan Islam, sehingga butir-butir Naskah Lima Rukun Khidmat Partai mencerminkan nilai ketuhanan dan yang lebih penting adalah tersirat bahwa segala aktifitas dan prilaku dalam hidup dan kehidupan harus disesuaikan dengan aturan dan tatanan secara Islami, dengan demikian maka jelas sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam risalah Nabi Muhammad SAW.

Sejarah telah membuktikan bagaimana upaya dan sepak terjang mempertahankan nilai-nilai Islam, sebut saja ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan tahun 1973 yang disahkan awal 1974, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1987, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama tahun 1989, Rancangan Undang-Undang tentang Perfilman, tentang Rancangan Undang-Undang Kepariwisata, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak tahun 1985.

Setiap pembahasan para Anggota DPR-RI dari Partai Persatuan Pembangunan sangat teliti dan jeli agar tidak ada produk Undang-Undang yang bertentangan dengan Syari'at Islam, hal yang dilakukan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan di atas tidak akan pernah dilakukan oleh Fraksi lain di DPR-RI, pembelaan dan perjuangan PPP secara kebetulan mendapat dukungan penuh

dari organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam), karena memang disadari bahwa Partai Persatuan Pembangunan sebagai satu-satunya wadah aspirasi Umat Islam¹⁵.

Keadaan politik di atas, membuat Golkar untuk berupaya merebut simpati Umat Islam dengan membentuk organisasi dengan simbol Islam, seperti Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Tarbiyah Islamiyah, Satkar Ulama Indonesia, Lembaga Pengajian Al Hidayah, Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII), sehingga Golkar juga menampakkan diri semakin "hijau" yang dapat mewakili Umat Islam dalam menyalurkan aspirasinya¹⁶.

2. Pidato Pimpinan DPRD NAD yang dalam proses ini adalah kader PPP yang dijabat oleh Drs.Tgk.H.Muhammad Yus yang selalu mendukung tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh harus secara kaffah, tentunya tatanan dalam hidup dan kehidupan yang disesuaikan dengan ajaran Islam, di maksudkan kaffah adalah keterlibatan semua pihak, kaffah dalam arti luas dan menyeluruh, bukan hanya terbatas masalah fiqh, tapi justru semua harus disesuaikan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang telah pernah diperbuat oleh para Sahabat.
Cita-cita tersebut nantinya akan terwujudlah "Daulah Islamiyah" yang sempurna di Aceh, karena itu harus ditanamkan keyakinan yang kuat dan melekat bagi umat Islam, khususnya pada orang Aceh, bahwa Islam itu akan membawa rahmat bagi seluruh alam yang ada di muka bumi ini¹⁷.
3. Pendapat Akhir Fraksi PPP maupun dalam pandangan umum Anggota DPRD dari PPP, bahwa tersirat bagaimana keinginan besar PPP yang di suarakan oleh jajaran fungsionaris Partai dalam setiap pembahasan Rancangan Qanun (Peraturan Daerah) untuk senantiasa mengacu pada tatanan sumber sesuai

¹⁵ Siddiq, PPP, h.10-27

¹⁶ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Jakarta: Kerja sama Mizan dengan Majalah Umat, 1997) h.192-193

¹⁷ Di kalirifikasi kembali oleh Penulis kepada Drs.Tgk. H. Muhammad Yus di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2006 di rumahnya kawasan Villa Mas Garden Bekasi Utara, dimana beliau adalah Ketua DPRD Prov. NAD masa Bakti 1999-2004

dengan Islam, seperti yang terpenting bagaimana memperjuangkan Konsederan Qanun untuk memasukkan Al Qur'an dan Al Hadits di urutan kesatu pada bagian MENGINGAT, dimana Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dikenal dalam tatanan aturan perundang-undangan hukum di Indonesia. Memasukkan sumber pokok ini dianggap substansi karena isi dari pada qanun mengacu pada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi, bagaimana harus melibatkan Al-Qur'an dan Al-Hadits jika tidak terdapat kedua sumber hukum Islam dimasukkan dalam konsideran.

4. Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai politik Islam yang berupaya memberi masukan dan saran kepada eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, sehingga PPP Prov. Naggroe Aceh Darussalam mengusulkan untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), membentuk Dinas Syari'at Islam, kelengkapan personalia pengawal Syari'at Islam di Aceh dengan membentuk Polisi Syari'ah atau dikenal dengan *Wilayatul Hisbah (WH)* baik tingkat Provinsi maupun di Kabupaten, membentuk Komisi F¹⁸ di DPRD NAD sebagai Komisi Keistimewaan, pembentukan Biro Keistimewaan pada Sekretariat Daerah Provinsi, khusus menangani Keistimewaan Aceh (berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yakni Keistimewaan Bidang Agama, Keistimewaan Bidang Pendidikan, Keistimewaan Bidang Adat serta Keistimewaan Peran Ulama dalam Kebijakan Daerah). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001, masalah Syari'at Islam masih tidak ada hambatan dan merupakan kewenangan Daerah, walau ada istilah Arab yang dihapus berdasarkan usulan Fraksi lain seperti "*Ahlul*

¹⁸Dalam Peraturannya pada DPRD Provinsi hanya dikenal sampai komisi E, tetapi untuk Prov. NAD ditambah lagi Komisi F yang khusus membidangi keistimewaan Aceh, walaupun dalam operasionalnya hanya terhadap keistimewaan bidang Agama yakni pelaksanaan Syari'at Islam, bidang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan bidang Adat Istiadat, sedangkan keistimewaan bidang Pendidikan tetap dtangani oleh Komisi E bidang Kesejahteraan Sosial termasuk Pendidikan didalamnya

Halli wal 'aqdi”, akibat sulit membaca dan tidak tau maksudnya lebih baik di hilangkan¹⁹ .

¹⁹Penjelasan ini di peroleh dari Drs.H.Muhammad Yus “memang ada pihak yang datang dari Aceh sendiri untuk tidak menerapkan Syari’at Islam di Aceh, walaupun mereka sudah pada posisi terjepit, antara lain karena tidak mengerti istilah Islam seperti *Ahlul halli wal 'aqdi*, maka Karimun Usman anggota DPR-RI dari PDI-Perjuangan asal pemilihan Aceh mengusulkan untuk di hapus saja, akhirnya istilah itu tidak muncul draf Undang-Undang No. 18 tersebut”(Drs.Muhammad Yus, Ketua DPP.PPP, wawancara di Bekasi, tanggal 13 Oktober 2006